

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abdurrachman, & Sudjadi. 1994. *Pendidikan Luar Biasa Umum*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Ali, A. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifin, T., Suhirman, A., Ahmad, D. S., & Ishak, D. I. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mahzab Hanafi)*. Bandung.
- Chomzah, A. A. 2002. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Chomzah, A. A. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Chomzah, A. A. 2007. *Sertifikat Dan Permasalahannya Dan Seri Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Daliyo dkk., 2011. *Hukum Agraria I (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: Prenahallindo.
- Dharma, S. 2012. *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori, Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Survei dan Potensi Tanah. 2007. *Petunjuk Teknis Direktorat Survei Dan Potensi Tanah*. Jakarta: Deputi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN RI.
- Harsono, B. 1999. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria: Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas)*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, S. 1992. *Kegunaan Sertifikat Dan Permasalahannya*. Seminar Nasional, Yogyakarta.
- Isnur, E. Y. 2012. *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Limbong, B. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

- Lubis, Y., & Lubis, A. R. 2015. *Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi, Cet. II)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Martani, D. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 40.
- Muhamad, A. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. 4)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parlindungan, A. P. 1999. *Pendaftaran tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998) (Cetakan Pertama)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P. 2002. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria (Cetakan Kesembilan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Philipus, H. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, W. 1975. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Cet. 4)*. Bandung: Sumur Bandung..
- Salindeho, J. 1988. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salle, A., dkk. 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Makassar: AS Publishing.
- Santoso, I. 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Santoso, U. 2011. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. 2011. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, U. 2015. *Peroleh Hak Atas Tanah*. Bandung: Kencana.
- Satriawan Surya, R. A. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soimin, S. 2004. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supranowo. 1992. *Sertifikat dan Permasalahannya*. Seminar nasional kegunaan sertifikat dan permasalahannya. Yogyakarta.

- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surakhmad, W. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sutedi, A. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. 2013. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syahrani, R. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tony. 2015. *Penyelesaian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Cacad: Hukum Administratif Pertanahan Kota Batam*. Batam.

**Sumber Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHPI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- Keputusan BPN RI nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

**Sumber Lainnya :**

- Feryanto, O. 2017. *Analisa Terhadap Efektivitas Yuridis Dalam Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam)*. Batam: UIB Repository.

Sahono, L. M. 2012. Penerbitan *Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya*. *Jurnal Perspektif*, 17(2)..

Sarah Diana Aulia, 2020. *Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)*. Skripsi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negerti Ar-Raniry Banda Aceh